

Akuntansi Kesejahteraan dan Realitas Struktur Konsumsi: Membaca Dinamika Ekonomi Rumah Tangga di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Welfare Accounting and the Reality of Consumption Structure: Reading Household Economic Dynamics in Nusa Tenggara Barat

Mery Afrianti 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Al-Azhar Mataram, Mataram, Indonesia

Abstrak

Dinamika pengeluaran rumah tangga merupakan indikator strategis dalam membaca kualitas kesejahteraan masyarakat, stabilitas daya beli, serta arah transformasi ekonomi regional. Namun demikian, kajian empiris di Indonesia masih didominasi pendekatan tingkat pengeluaran, sementara analisis struktur konsumsi relatif terbatas. Kesenjangan ini menyebabkan pengukuran kesejahteraan sering bias karena belum membedakan antara pertumbuhan konsumsi yang bersifat *welfare-driven* dan *price-driven*. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika pertumbuhan pengeluaran rumah tangga per kapita disesuaikan serta transformasi struktur konsumsi pangan dan non-pangan antar kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-analitis dengan desain longitudinal dan komparatif kewilayahan berbasis kerangka *welfare accounting*. Data sekunder bersumber dari statistik konsumsi rumah tangga BPS periode 2010–2025 dan 2016–2024. Teknik analisis meliputi *Compound Annual Growth Rate (CAGR)*, Engel Ratio, tipologi kesejahteraan konsumsi, serta interpretasi spasial-struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota mengalami pertumbuhan pengeluaran riil, dengan level absolut tertinggi di Kota Mataram dan pertumbuhan tercepat di Kabupaten Sumbawa. Namun demikian, transformasi struktur konsumsi belum sepenuhnya progresif. Mayoritas wilayah masih didominasi pengeluaran pangan di atas 50%, bahkan meningkat di beberapa kabupaten seperti Dompu dan Lombok Timur. Kondisi ini menandakan tekanan kebutuhan subsisten serta terbatasnya diversifikasi konsumsi non-pangan produktif. Integrasi analisis level dan struktur mengungkap paradoks kesejahteraan: pertumbuhan konsumsi tidak selalu diikuti peningkatan kualitas kesejahteraan. Disimpulkan bahwa transformasi kesejahteraan konsumsi NTB masih berada pada fase transisional dengan disparitas spasial urban–rural yang nyata. Rekomendasi diarahkan pada stabilisasi pangan, diversifikasi pendapatan, penguatan investasi sosial, serta pengembangan sistem *welfare accounting* daerah guna memastikan pertumbuhan konsumsi berorientasi peningkatan utilitas kesejahteraan secara berkelanjutan.

DOI

[10.63892/aletheia.3.2026.49-60](https://doi.org/10.63892/aletheia.3.2026.49-60)

Tanggal Diajukan

21 Januari 2026

Tanggal Diterima

12 Mei 2026

Tanggal Diterbitkan

3 Juni 2026

Penulis Korespondensi

Mery Afrianti
afriantimery53@gmail.com

© Penulis 2026



Karya ini dilisensikan di bawah lisensi CC BY-NC-SA 4.0. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Kata Kunci

Pengeluaran Rumah Tangga; Struktur Konsumsi; Engel Ratio; Kesejahteraan; Disparitas Regional; Nusa Tenggara Barat (NTB).

Abstract

Household expenditure dynamics constitute a strategic indicator for assessing welfare quality, purchasing power stability, and regional economic transformation. Nevertheless, empirical studies in Indonesia remain dominated by expenditure-level analysis, while consumption structure receives limited attention. This gap risks welfare mismeasurement by failing to distinguish welfare-driven from price-driven consumption growth. This study aims to examine the growth dynamics of adjusted per capita household expenditure and the transformation of food and non-food consumption structures across districts/municipalities in Nusa Tenggara Barat (NTB) Province. A quantitative descriptive-analytical approach with longitudinal and spatial comparative design was employed within a welfare accounting framework. Secondary data were derived from official household consumption statistics (2010–2025; 2016–2024). Analytical techniques included CAGR, Engel Ratio, welfare typology classification, and spatial-structural interpretation. Findings reveal universal real expenditure growth, with the highest absolute level in Mataram City and the fastest growth in Sumbawa Regency. However, structural transformation remains limited. Most regions retain food expenditure shares above 50%, with increases in several districts, indicating subsistence pressure and constrained diversification toward productive non-food spending. The integrated analysis exposes a welfare paradox: consumption growth does not automatically translate into welfare improvement. The study concludes that NTB's consumption welfare transformation remains transitional with pronounced urban–rural disparities. Policy recommendations emphasize food price stabilization, income diversification, social investment expansion, and the establishment of regional welfare accounting systems to ensure that consumption growth translates into sustainable welfare gains.

Keywords

Household Expenditure; Consumption Structure; Engel Ratio; Welfare; Regional Disparities; West Nusa Tenggara.

1. Pendahuluan

Dinamika pengeluaran rumah tangga merupakan indikator strategis dalam membaca kualitas kesejahteraan masyarakat, stabilitas daya beli, serta arah transformasi ekonomi regional. Dalam perspektif akuntansi kesejahteraan, pengeluaran tidak sekadar dipahami sebagai arus kas keluar, melainkan sebagai representasi kapasitas ekonomi riil yang mencerminkan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar, sosial, dan produktif secara berkelanjutan. Struktur pengeluaran merefleksikan prioritas alokasi sumber daya ekonomi keluarga sekaligus tingkat ketahanan finansial dalam menghadapi tekanan makroekonomi, sehingga menjadi instrumen penting dalam menilai kualitas pembangunan dari sisi mikro kesejahteraan (Hariyanto dkk., 2021).

Dalam kerangka akuntansi rumah tangga, pola konsumsi sangat dipengaruhi oleh pendapatan, jumlah tanggungan, dan karakteristik sosial ekonomi keluarga. Rumah tangga berpendapatan rendah cenderung mengalokasikan proporsi lebih besar pada kebutuhan pangan, sehingga ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, dan investasi sosial menjadi terbatas. Dominasi konsumsi pangan tidak hanya mencerminkan keterbatasan kapasitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan kerentanan kesejahteraan jangka panjang (Handayani & Yulistiyono, 2023). Pada level makro, konsumsi rumah tangga merupakan kontributor utama pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga perubahan tingkat dan struktur pengeluaran berimplikasi langsung terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia (Amelia dkk., 2025).

Kesejahteraan suatu rumah tangga dapat diukur melalui besaran konsumsi atau jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh mereka. Rumah tangga dengan pendapatan rendah cenderung lebih memfokuskan pengeluaran pada kebutuhan makanan dibandingkan dengan kebutuhan lainnya. Pendapatan rumah tangga merujuk pada penghasilan yang diterima oleh suatu keluarga, baik dari kepala keluarga maupun dari anggota lainnya (Kinanti Ayunda Febri dkk., 2024). Penghasilan ini dapat dinilai dari kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka selama periode tertentu, biasanya dalam satu bulan. Pengertian pendapatan adalah total semua penghasilan yang diterima oleh penduduk di suatu negara dalam satu tahun. Jumlah tanggungan dalam sebuah keluarga adalah salah satu indikator yang berkaitan dengan ekonomi, yang menunjukkan bahwa semakin banyak tanggungan, semakin besar pula tantangan ekonomi yang dihadapi keluarga. Ini dikarenakan tingginya biaya hidup, dimana mayoritas pendapatan keluarga dihabiskan untuk makanan dan kebutuhan dasar, sehingga kesempatan untuk menabung menjadi sangat terbatas.

Dalam memperkaya kerangka analitis, penelitian ini juga menempatkan pengeluaran rumah tangga dalam perspektif akuntansi konsumsi, yang memotret kualitas distribusi belanja antara pangan dan non-pangan sebagai refleksi elastisitas daya beli, kapasitas investasi sosial, dan ketahanan ekonomi keluarga. Struktur konsumsi yang masih didominasi pangan menunjukkan keterbatasan diversifikasi kesejahteraan, sedangkan peningkatan pengeluaran non-pangan menandakan ekspansi kualitas hidup melalui pendidikan, kesehatan, dan jasa produktif (Artika & Marini, 2023). Secara lebih luas, konsumsi dianalisis pula dalam kerangka akuntansi pembangunan, yang memandang pengeluaran rumah tangga sebagai komponen strategis pembentuk permintaan agregat dan penggerak pertumbuhan ekonomi regional. Oleh karena itu, peningkatan konsumsi harus dibaca kualitasnya—apakah mencerminkan peningkatan kesejahteraan riil atau sekadar tekanan harga kebutuhan dasar (Amelia dkk., 2025).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi konteks empiris penting karena memiliki karakteristik ekonomi dualistik berbasis sektor primer, pariwisata, dan pertambangan. Transformasi struktur ekonomi daerah turut memengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat. Namun demikian, peningkatan pengeluaran nominal tidak selalu identik dengan peningkatan kesejahteraan riil, karena inflasi pangan dapat meningkatkan pengeluaran tanpa diikuti peningkatan daya beli, sehingga membebani rumah tangga berpendapatan rendah (Angraeni dkk., 2025). Selain itu, ketimpangan distribusi pendapatan terbukti menghambat transmisi pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah dengan basis ekonomi primer

(Aisyah dkk., 2023). Disparitas kemiskinan regional di NTB juga berdampak pada rendahnya diversifikasi konsumsi dan terbatasnya alokasi pengeluaran non-pangan produktif (Primadianti & Sugiyanto, 2020).

Bertolak dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teoritik berlapis. Pada *grand theory*, digunakan perspektif kesejahteraan ekonomi yang menempatkan konsumsi sebagai indikator distribusi utilitas dan kualitas hidup Masyarakat. Tingkat pengeluaran merefleksikan kemampuan individu memenuhi kebutuhan dasar serta mengakses layanan sosial. Ketimpangan konsumsi antarwilayah (spasial) mencerminkan ketimpangan distribusi kesejahteraan dalam sistem ekonomi (Aisyah dkk., 2023). Pada tataran *middle-range theory* digunakan teori keterkaitan konsumsi dan kemiskinan yang menekankan bahwa kapasitas pengeluaran riil berhubungan erat dengan kedalaman kemiskinan dan kerentanan ekonomi. Rumah tangga miskin cenderung mengalokasikan proporsi lebih besar untuk pangan, sedangkan rumah tangga sejahtera memiliki pola konsumsi lebih terdiversifikasi. Pola ini juga berkaitan dengan kedalaman kemiskinan dan kerentanan ekonomi regional (Aprirachman dkk., 2025). Sementara pada *applied theory*, digunakan pendekatan akuntansi pengeluaran rumah tangga yang memandang konsumsi sebagai refleksi prioritas alokasi sumber daya dan keseimbangan finansial keluarga (Hariyanto dkk., 2021).

Perkembangan mutakhir literatur menunjukkan pergeseran fokus dari pengukuran tingkat konsumsi menuju analisis kualitas struktur konsumsi. Komposisi pengeluaran pangan dan non-pangan dinilai lebih mampu menjelaskan ketahanan ekonomi, kapasitas investasi sosial, serta arah transformasi kesejahteraan dibanding ukuran agregat konsumsi semata (Artika & Marini, 2023). Namun demikian, integrasi analisis tingkat pengeluaran dan struktur konsumsi secara longitudinal dan spasial masih terbatas, khususnya di wilayah kepulauan seperti NTB yang memiliki heterogenitas ekonomi tinggi. Oleh karena itu, studi ini menghadirkan kebaruan melalui sintesis pendekatan akuntansi kesejahteraan (*welfare accounting*) dan ekonomi pembangunan untuk mengungkap dinamika pertumbuhan pengeluaran, transformasi struktur konsumsi, serta implikasinya terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga dalam diskursus Perekonomian Indonesia (Aprilia dkk., 2025)

Penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan utama: bagaimana dinamika pertumbuhan pengeluaran rumah tangga per kapita disesuaikan antar kabupaten/kota di Provinsi NTB, serta bagaimana transformasi struktur pengeluaran pangan dan non-pangan dalam konteks dengan ketahanan daya beli dan kerentanan kemiskinan. Sejalan dengan itu, penelitian bertujuan menganalisis pertumbuhan pengeluaran sebagai indikator kapasitas ekonomi riil sekaligus mengkaji perubahan struktur konsumsi dalam kerangka akuntansi konsumsi, guna menilai apakah peningkatan pengeluaran bersifat *welfare-driven* atau sekadar *price-driven*, serta merumuskan implikasinya terhadap disparitas kesejahteraan dan arah kebijakan pembangunan daerah.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-analitis dengan desain longitudinal dan komparatif kewilayahan untuk mengkaji dinamika kesejahteraan rumah tangga di Provinsi NTB. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada argumentasi bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan indikator moneter paling representatif dalam membaca kesejahteraan riil karena mencerminkan kapasitas utilitas ekonomi aktual, bukan sekadar potensi pendapatan nominal. Dalam kerangka *welfare accounting*, konsumsi dipandang sebagai proksi distribusi kesejahteraan dan utilitas sosial karena merefleksikan kemampuan rumah tangga mengakses kebutuhan dasar dan non-dasar secara berkelanjutan (Dávila & Schaab, 2023; Dávila & Schaab, 2024). Selain itu, dalam perspektif transformasi struktural, perubahan tingkat dan komposisi konsumsi memiliki keterkaitan erat dengan produktivitas ekonomi, urbanisasi, dan diferensiasi harga sektoral (Duarte, 2020). Oleh karena itu, pendekatan longitudinal diperlukan untuk menangkap dinamika pertumbuhan antarwaktu, sedangkan komparasi spasial digunakan untuk mengidentifikasi disparitas kesejahteraan antar kabupaten/kota.

Kebutuhan data dalam studi ini bersumber dari data sekunder resmi statistik konsumsi rumah tangga yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, khususnya pengeluaran per kapita disesuaikan dan persentase pengeluaran pangan serta non-pangan menurut kabupaten/kota. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi statistik terpublikasi yang memiliki validitas metodologis nasional dan konsistensi time series. Data konsumsi rumah tangga berbasis survei pengeluaran diakui sebagai instrumen utama dalam mengukur ketahanan pangan, kesejahteraan ekonomi, dan kerentanan sosial karena mampu menangkap perilaku konsumsi aktual rumah tangga (Abdalla & Elzaki, 2022; Sibrián, 2008). Setelah dikompilasi, data diolah melalui tahapan normalisasi satuan, verifikasi konsistensi antarperiode, dan harmonisasi klasifikasi belanja guna memastikan komparabilitas longitudinal.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dinamika Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga Per Kapita Disesuaikan: Perspektif Akuntansi Kesejahteraan Regional

Pengeluaran rumah tangga per kapita disesuaikan merupakan indikator fundamental dalam menilai kapasitas ekonomi riil masyarakat karena mencerminkan kemampuan konsumsi yang telah dikoreksi terhadap perubahan harga. Dalam perspektif akuntansi kesejahteraan, indikator ini tidak hanya menggambarkan tingkat daya beli, tetapi juga merepresentasikan kualitas alokasi sumber daya ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar maupun sekunder. Analisis longitudinal terhadap perkembangan pengeluaran per kapita antar kabupaten/kota menjadi penting untuk membaca dinamika pertumbuhan kesejahteraan, mengidentifikasi disparitas kewilayahan, dan mengetahui bagaimana ekspansi ekonomi regional ditransmisikan ke tingkat rumah tangga. Oleh karena itu, Tabel 1 menyajikan perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan beserta laju pertumbuhannya dalam kurun waktu 15 tahun terakhir (2010-2025) sebagai basis diagnosis awal kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat di Provinsi NTB.

Tabel 1 merepresentasikan perkembangan pengeluaran rumah tangga per kapita disesuaikan di Provinsi NTB sebagai proksi langsung kapasitas ekonomi mikro masyarakat. Dalam perspektif akuntansi kesejahteraan (*welfare accounting*), pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan inflasi merupakan indikator riil daya beli dan kualitas hidup, karena mencerminkan kemampuan rumah tangga membiayai kebutuhan dasar maupun sekunder secara berkelanjutan. Hasil komparasi pengeluaran rumah tangga per kapita disesuaikan periode 2010–2025 menunjukkan adanya peningkatan kapasitas konsumsi riil di seluruh kabupaten/kota Provinsi NTB, namun dengan tingkat akselerasi dan kedalaman kesejahteraan yang berbeda. Secara agregat, pengeluaran per kapita NTB meningkat dari Rp8.707 ribu menjadi Rp11.922 ribu dengan laju 2,12%, menandakan ekspansi kapasitas konsumsi masyarakat.

Kota Mataram secara konsisten menempati posisi nilai absolut tertinggi (Rp16.581 ribu), hingga tahun 2025, yang menegaskan dominasi kapasitas daya beli masyarakat perkotaan dalam struktur konsumsi regional yang berbasis jasa dan perdagangan. Tingginya level pengeluaran ini mencerminkan intensitas aktivitas ekonomi, aksesibilitas terhadap barang dan jasa, serta kedalaman pasar konsumsi yang lebih mapan dibanding wilayah lain. Pada strata tinggi berikutnya, Kabupaten Sumbawa Barat (Rp12.983 ribu), dan Kota Bima (Rp12.623 ribu), juga menunjukkan kapasitas konsumsi relatif kuat, meskipun dengan karakter pertumbuhan yang berbeda; Sumbawa Barat cenderung stabil moderat, sedangkan Kota Bima memperlihatkan akselerasi lebih progresif yang menandakan penguatan konsumsi perkotaan sekunder di luar ibukota Provinsi NTB.

Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Sumbawa (2,75%) dan Kabupaten Lombok Utara (2,66%), yang mengindikasikan akselerasi aktivitas ekonomi lokal dan peningkatan disposable income (jumlah pendapatan pribadi atau uang yang tersisa setelah dikurangi pengeluaran seperti pajak dan kewajiban wajib lainnya).

Tabel 1. Dinamika Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita Disesuaikan di Provinsi NTB Kurun Waktu 2010–2025

Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)			Keterangan
	2010	2025	Laju (%)	
Lombok Barat	10.010	12.544	1,52	Level pengeluaran tinggi dengan pertumbuhan paling lambat, menunjukkan fase kematangan konsumsi dan ekspansi kesejahteraan yang mulai terbatas.
Lombok Tengah	8.464	11.870	2,28	Pengeluaran menengah dengan pertumbuhan progresif, mencerminkan akselerasi kapasitas konsumsi menuju konvergensi kesejahteraan regional.
Lombok Timur	7.575	10.851	2,42	Level pengeluaran relatif rendah namun tumbuh signifikan, menandakan peningkatan daya beli meski tekanan kesejahteraan masih kuat.
Sumbawa	7.138	10.716	2,75	Mencatat laju pertumbuhan tertinggi, menunjukkan percepatan ekspansi konsumsi dan penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga.
Dompu	7.102	10.230	2,46	Level pengeluaran rendah dengan pertumbuhan moderat, mencerminkan fase awal transformasi kesejahteraan konsumsi.
Bima	7.144	9.821	2,14	Kapasitas konsumsi masih terbatas dengan pertumbuhan bertahap, menunjukkan perbaikan daya beli namun belum konvergen.
Sumbawa Barat	9.677	12.983	1,98	Level pengeluaran tinggi dengan pertumbuhan stabil, merefleksikan keseimbangan antara kapasitas konsumsi dan akselerasi kesejahteraan.
Lombok Utara	7.083	10.502	2,66	Pengeluaran relatif rendah namun tumbuh progresif, menandakan pemulihan dan penguatan daya beli rumah tangga.
Kota Mataram	11.800	16.581	2,40	Nilai absolut tertinggi dengan pertumbuhan stabil, mencerminkan kapasitas konsumsi dan kesejahteraan urban paling mapan.
Kota Bima	8.959	12.623	2,31	Pengeluaran tinggi dengan akselerasi moderat, menunjukkan penguatan konsumsi wilayah perkotaan sekunder.
Provinsi NTB	8.707	11.922	2,12	Tumbuh konsisten, mencerminkan peningkatan daya beli regional, tetapi disparitas kesejahteraan spasial masih nyata.

Sumber: Tabel Statistik, Konsumsi dan Pendapatan, [Metode Baru] Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, Tahun 2010-2025. BPS Prov. NTB. Data Diolah. 2025.

Secara makro, peningkatan pengeluaran mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-guncangan dan berimplikasi pada penurunan tekanan kemiskinan apabila pertumbuhan tersebut inklusif (Aprirachman dkk., 2025). Namun demikian, ketimpangan laju pertumbuhan menunjukkan bahwa distribusi kesejahteraan belum merata antarwilayah.

Pada kelompok menengah, Kabupaten Lombok Barat (Rp12.544 ribu) tetap berada pada level pengeluaran tinggi, namun mencatat laju pertumbuhan paling rendah di NTB (1,52%). Kondisi ini menunjukkan fase kematangan konsumsi, dimana kapasitas kesejahteraannya relatif mapan tetapi ruang ekspansi mulai terbatas. Sebaliknya, Kabupaten Lombok Tengah (Rp11.870 ribu) dan Kabupaten Lombok Timur (Rp10.851 ribu) menampilkan pola akselerasi kesejahteraan yang lebih dinamis. Meskipun level *absolut* keduanya belum setinggi wilayah urban, namun laju pertumbuhan yang relatif tinggi menandakan proses konvergensi kesejahteraan melalui peningkatan kapasitas konsumsi rumah tangga. Kabupaten Sumbawa (Rp10.716 ribu) bahkan mencatat laju pertumbuhan tertinggi (2,75%) sepanjang periode 2010-2025, menunjukkan percepatan ekspansi daya beli yang signifikan meskipun level absolutnya masih berada pada kategori menengah.

Sementara itu, Kabupaten Dompu (Rp10.230 ribu), Kabupaten Lombok Utara (Rp10.502 ribu), dan Kabupaten Bima (Rp9.821 ribu) berada pada kelompok level konsumsi terendah hingga tahun 2025. Namun demikian, ketiganya menunjukkan pertumbuhan yang relatif progresif, terutama Kabupaten Lombok Utara (2,66%) dan Kabupaten Dompu (2,46%) yang mencerminkan fase akselerasi awal kesejahteraan. Kabupaten Bima, meskipun mengalami peningkatan (2,14%), tetap menjadi wilayah dengan kapasitas konsumsi paling rendah, menandakan keterbatasan daya beli relatif dibanding kabupaten/kota lain. Dengan kata lain,

pembacaan simultan antara level absolut dan laju pertumbuhan menegaskan bahwa transformasi kesejahteraan di NTB berlangsung tidak linier: wilayah dengan level tinggi cenderung melambat, sementara wilayah berlevel rendah mengalami percepatan sebagai bagian dari proses konvergensi regional.

Dalam perspektif akuntansi pembangunan, disparitas level pengeluaran ini mencerminkan perbedaan kapasitas ekonomi regional dalam membentuk konsumsi akhir rumah tangga sebagai komponen permintaan agregat. Wilayah dengan pengeluaran per kapita lebih tinggi memiliki kemampuan lebih besar dalam mendorong sirkulasi ekonomi lokal, memperkuat *multiplier effect* konsumsi, dan meningkatkan kontribusi terhadap pembentukan output regional. Namun demikian, temuan pada [Tabel 1](#) juga menegaskan bahwa pertumbuhan pengeluaran tidak selalu linier dengan level kesejahteraan, karena beberapa wilayah berpengeluaran rendah justru menunjukkan laju pertumbuhan lebih progresif. Dengan kata lain, analisis level dan pertumbuhan harus dibaca secara simultan untuk menilai apakah transformasi konsumsi bersifat konvergen atau justru memperlebar disparitas kesejahteraan antarwilayah ([Amelia dkk., 2025](#)).

3.2. Transformasi Struktur Konsumsi Pangan dan Non-Pangan

Selain tingkat pengeluaran, struktur komposisi konsumsi pangan dan non-pangan merupakan instrumen analitis yang lebih dalam untuk membaca kualitas kesejahteraan rumah tangga. Dalam kerangka akuntansi konsumsi, proporsi pengeluaran pangan mencerminkan tingkat tekanan kebutuhan dasar, sedangkan peningkatan pengeluaran non-pangan menandakan ekspansi kapasitas sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, dan jasa. Transformasi struktur konsumsi juga berkaitan erat dengan dinamika daya beli, inflasi, serta ketahanan ekonomi regional dalam konteks perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, [Tabel 2](#) menyajikan perbandingan persentase pengeluaran makanan dan bukan makanan antarwilayah kabupaten/kota periode 2016–2024 guna mengidentifikasi pola Engel Ratio, disparitas spasial, serta arah perubahan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat ([Apriliani dkk., 2024](#)).

Tabel 2. Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Kurun Waktu 2016–2024

Kab./Kota	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Perkotaan dan Perdesaan					
	2016		2024		Laju Pertumbuhan 2016-2024 (%)	
	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan
Lombok Barat	54,44	45,56	58,95	41,02	1,01	-1,30
Lombok Tengah	56,83	43,17	58,28	41,72	0,32	-0,43
Lombok Timur	58,72	41,28	62,59	37,41	0,80	-1,22
Sumbawa	51,41	48,59	54,03	45,97	0,62	-0,69
Dompu	53,62	46,38	62,18	37,82	1,87	-2,52
Bima	59,03	40,97	59,28	40,72	0,05	-0,08
Sumbawa Barat	55,36	44,64	52,99	47,01	-0,55	0,65
Lombok Utara	57,04	42,96	62,05	37,95	1,06	-1,54
Kota Mataram	43,97	56,03	47,27	52,73	0,91	-0,76
Kota Bima	49,29	50,71	51,41	48,59	0,53	-0,53
Provinsi NTB	53,92	46,08	57,16	42,84	0,73	-0,91

Sumber: Tabel Statistik, Konsumsi dan Pendapatan, Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, Tahun 2016-2024. BPS Prov. NTB. Data Diolah. 2025.

Perubahan struktur pengeluaran pangan dan non-pangan merupakan indikator kunci dalam membaca kualitas kesejahteraan rumah tangga karena mencerminkan prioritas alokasi sumber daya ekonomi keluarga. Dalam perspektif akuntansi konsumsi, komposisi pengeluaran tidak hanya merekam besaran belanja, tetapi juga menggambarkan elastisitas daya beli, kapasitas investasi sosial, dan ketahanan ekonomi rumah tangga. Proporsi pengeluaran pangan yang tinggi menunjukkan dominasi kebutuhan subsisten, sedangkan peningkatan pengeluaran non-pangan menandakan ekspansi kesejahteraan melalui belanja pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan jasa produktif (Artika & Marini, 2023; Mustafa dkk., 2022). Oleh karena itu, analisis struktur konsumsi menjadi instrumen analitis yang lebih sensitif dibanding ukuran pengeluaran absolut dalam mengidentifikasi kualitas pembangunan kesejahteraan.

Data pada Tabel 2 menunjukkan perubahan komposisi pengeluaran makanan dan bukan makanan. Struktur konsumsi Provinsi NTB (2016–2024) menunjukkan kecenderungan meningkatnya proporsi pengeluaran pangan dari 53,92% menjadi 57,16% atau mengalami laju pertumbuhan mencapai 0,73%. Kenaikan ini mengindikasikan menyempitnya ruang fiskal rumah tangga untuk konsumsi non-pangan produktif. Dalam perspektif akuntansi konsumsi, struktur ini mencerminkan prioritas alokasi sumber daya rumah tangga.

Dalam literatur internasional, peningkatan food share sering dikaitkan dengan tekanan daya beli, stagnasi pendapatan riil, atau kenaikan harga kebutuhan dasar, terutama pada kelompok berpendapatan menengah-bawah (Abdalla & Elzaki, 2022; Marchetti & Secondi, 2022). Dalam konteks ini, meskipun pengeluaran nominal meningkat, struktur konsumsi NTB menunjukkan gejala tekanan kesejahteraan struktural.

Ditinjau dari aspek kewilayahan, peningkatan proporsi pangan paling signifikan terjadi di Kabupaten Dompu (+8,56 poin), Lombok Utara (+5,01), dan Lombok Timur (+3,87). Secara teoritik, terjadinya peningkatan *food share* mengindikasikan tekanan daya beli atau stagnasi pendapatan riil, karena rumah tangga terpaksa mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk kebutuhan dasar (makanan). Inflasi pangan terbukti memiliki dampak langsung terhadap kemampuan konsumsi masyarakat Indonesia, terutama kelompok berpendapatan rendah (Angraeni dkk., 2025).

Kenaikan tajam ini menempatkan ketiga wilayah pada kategori kerentanan kesejahteraan tinggi karena rumah tangga harus mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan dasar. Pola tersebut konsisten dengan temuan global bahwa wilayah dengan basis ekonomi primer dan produktivitas rendah cenderung memiliki *food expenditure share* lebih tinggi akibat keterbatasan diversifikasi pendapatan (Kassahun dkk., 2022; Khan & Mohanty, 2022). Kondisi ini juga berkorelasi dengan kerentanan kemiskinan dan kedalaman deprivasi konsumsi, karena ruang belanja untuk human capital menjadi lebih terbatas.

Sebaliknya, Kabupaten Sumbawa Barat menjadi satu-satunya wilayah yang mengalami penurunan proporsi pengeluaran pangan (-2,37 poin) disertai peningkatan non-pangan. Fenomena ini menandakan proses diversifikasi konsumsi dan ekspansi kesejahteraan yang lebih progresif karena adanya pergeseran menuju pengeluaran produktif. Dalam kerangka transformasi struktural, pergeseran konsumsi dari pangan ke non-pangan mencerminkan peningkatan pendapatan riil, urbanisasi ekonomi, serta perluasan akses terhadap layanan sosial dan jasa (Desmet & Rossi-Hansberg, 2013; Duarte, 2020). Pola serupa juga ditemukan diberbagai negara berkembang, dimana peningkatan pendapatan mendorong konsumsi jasa dan investasi kualitas hidup (Tudorel dkk., 2024).

Kota Mataram tetap menunjukkan struktur konsumsi paling terdiversifikasi dengan proporsi pangan terendah dan non-pangan tertinggi. Kondisi ini merefleksikan karakter ekonomi urban dengan kedalaman pasar jasa yang lebih kuat, tingkat pendidikan lebih tinggi, serta akses layanan sosial yang lebih luas. Literatur urban accounting menegaskan bahwa wilayah perkotaan cenderung memiliki struktur konsumsi lebih kompleks karena didukung produktivitas tinggi dan konsentrasi aktivitas ekonomi modern (Desmet & Rossi-Hansberg,

2013). Sekalipun laju pertumbuhan konsumsi non-pangan menurun (0,76%), namun hal ini menempatkan Kota Mataram sebagai benchmark kesejahteraan konsumsi di NTB.

Namun demikian, dominasi pengeluaran pangan di atas 50% pada hampir seluruh kabupaten/kota menegaskan bahwa struktur kesejahteraan NTB masih berada pada fase transisional. Dalam kerangka welfare accounting, struktur konsumsi seperti ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran belum sepenuhnya mencerminkan ekspansi utilitas kesejahteraan, melainkan masih dipengaruhi tekanan kebutuhan dasar seperti makanan (Dávila & Schaab, 2023; De Magalhaes & Santaaulia-Llopis, 2015). Maknanya, kualitas pertumbuhan konsumsi masih bersifat survival-driven (berorientasi pada kelangsungan hidup), belum *welfare-driven* (berorientasi pada kesejahteraan).

Dari perspektif perekonomian Indonesia, transformasi struktur konsumsi juga memiliki implikasi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar permintaan agregat, sehingga perubahan komposisi belanja akan memengaruhi struktur produksi, sektor jasa, dan akumulasi modal manusia (Amelia dkk., 2025; Eastwood, 2012). Apabila dominasi pangan terus berlanjut, maka kapasitas investasi sosial rumah tangga berpotensi terhambat, yang pada akhirnya memperlambat transformasi ekonomi jangka panjang.

Struktur konsumsi seperti ini menegaskan 3 (tiga) diagnosis utama. Pertama, terjadi peningkatan tekanan konsumsi pangan di mayoritas wilayah NTB. Kedua, terdapat disparitas spasial yang tajam antara wilayah perkotaan (urban) dan perdesaan (rural) dalam diversifikasi konsumsi. Ketiga, transformasi kesejahteraan masih berada pada tahap awal karena ekspansi non-pangan belum merata.

3.3. Disparitas Struktural dan Kesejahteraan Konsumsi

Integrasi antara dinamika tingkat pengeluaran dan struktur konsumsi memberikan kerangka analitis yang lebih komprehensif dalam menilai kualitas kesejahteraan rumah tangga. Dalam perspektif welfare accounting, kesejahteraan tidak hanya diukur dari besaran konsumsi, tetapi juga dari komposisi alokasinya serta kemampuan rumah tangga mengonversi pengeluaran menjadi utilitas kesejahteraan yang berkelanjutan (Dávila & Schaab, 2023; Dávila & Schaab, 2024).

Hasil integrasi menunjukkan adanya paradoks struktural. Beberapa wilayah dengan pertumbuhan pengeluaran relatif tinggi justru masih didominasi pengeluaran pangan. Kondisi ini mengindikasikan keterbatasan transformasi kesejahteraan karena peningkatan konsumsi belum diikuti diversifikasi belanja sosial produktif (De Magalhaes & Santaaulia-Llopis, 2015). Rumah tangga tetap terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar sehingga ruang investasi pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup menjadi terbatas. Dengan demikian, akselerasi pengeluaran tidak otomatis mencerminkan peningkatan kesejahteraan riil.

Fenomena tersebut juga berkaitan dengan struktur sistem pangan dan kerentanan ketahanan konsumsi. Studi global menunjukkan bahwa dominasi pengeluaran pangan sering kali berkorelasi dengan ketidakstabilan akses pangan, fluktuasi harga, serta keterbatasan sistem distribusi yang efisien (Béné dkk., 2019; Abdalla & Elzaki, 2022). Dalam konteks ini, tingginya Engel Ratio di sejumlah kabupaten NTB merefleksikan tekanan kebutuhan subsisten yang masih kuat, sehingga transformasi konsumsi menuju non-pangan berjalan lebih lambat.

Dari perspektif hierarki kebutuhan, struktur konsumsi yang masih didominasi pangan menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga masih berada pada level pemenuhan kebutuhan dasar. Analisis berbasis Maslow menegaskan bahwa sebelum kebutuhan fisiologis terpenuhi secara stabil, rumah tangga cenderung belum mengalokasikan sumber daya secara signifikan pada kebutuhan pengembangan diri dan kesejahteraan jangka panjang (Defpta dkk., 2025). Oleh karena itu, komposisi konsumsi menjadi indikator penting dalam menilai kedalaman kesejahteraan, bukan sekadar permukaan nominal pengeluaran.

Disparitas antara wilayah administrasi pemerintahan daerah Kota dan Kabupaten juga menegaskan dimensi spasial kesejahteraan konsumsi. Dalam kerangka urban accounting, wilayah perkotaan memiliki kapasitas utilitas konsumsi lebih tinggi karena didukung produktivitas ekonomi, akses pasar, dan diversifikasi sektor jasa (Desmet & Rossi-Hansberg, 2013). Hal ini menjelaskan mengapa wilayah urban menunjukkan *Engel Ratio* lebih rendah meskipun tingkat pengeluarannya tinggi. Struktur konsumsi menjadi lebih kompleks dan berorientasi kualitas hidup.

Transformasi struktural konsumsi juga memiliki implikasi makroekonomi jangka panjang. Pergeseran dari pangan ke non-pangan mencerminkan perubahan produktivitas sektor, diferensiasi harga relatif, serta ekspansi sektor manufaktur dan jasa (Duarte, 2020). Jika transformasi ini berjalan lambat, maka proses modernisasi ekonomi regional juga berpotensi terhambat karena konsumsi masih terkonsentrasi pada sektor primer berproduktivitas rendah.

Selain itu, struktur konsumsi berkaitan erat dengan ketahanan pangan dan kemiskinan multidimensi. Rumah tangga dengan proporsi pangan tinggi cenderung memiliki kerentanan lebih besar terhadap guncangan ekonomi, perubahan harga, maupun krisis distribusi pangan (Kassahun dkk., 2022; Khan & Mohanty, 2022). Bahkan dalam konteks global, beban biaya diet sehat menjadi indikator baru dalam mengukur kemiskinan konsumsi dan kesejahteraan riil (Stehl dkk., 2025).

Dengan demikian, sintesis pengeluaran rumah tangga per kapita disesuaikan (Tabel 1) dan pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan (Tabel 2) menghasilkan tiga diagnosis utama. Pertama, pertumbuhan pengeluaran rumah tangga di NTB belum sepenuhnya diikuti transformasi struktur konsumsi yang progresif. Kedua, terdapat paradoks kesejahteraan dimana wilayah dengan pertumbuhan tinggi masih memiliki kerentanan konsumsi akibat dominasi pangan. Ketiga, disparitas spasial antara wilayah urban dan rural menunjukkan perbedaan kapasitas konversi pengeluaran menjadi utilitas kesejahteraan. Dalam perspektif welfare accounting, kondisi ini menegaskan bahwa kualitas pembangunan konsumsi NTB masih berada pada fase transisional, dimana peningkatan kapasitas belanja belum sepenuhnya terartikulasikan dalam diversifikasi kesejahteraan rumah tangga.

4. Kesimpulan

Dinamika pengeluaran rumah tangga di Provinsi NTB menunjukkan adanya pertumbuhan kapasitas konsumsi riil yang positif dalam kurun longitudinal, sebagaimana tercermin dari peningkatan pengeluaran per kapita disesuaikan di seluruh kabupaten/kota. Dalam perspektif akuntansi kesejahteraan dan akuntansi pembangunan, ekspansi ini menandakan penguatan daya beli dan aktivitas ekonomi regional pada level mikro rumah tangga. Namun demikian, integrasi analisis tingkat pengeluaran dan struktur konsumsi mengungkap paradoks kesejahteraan yang bersifat struktural. Transformasi pengeluaran belum sepenuhnya diikuti diversifikasi konsumsi non-pangan, karena mayoritas wilayah masih menunjukkan dominasi proporsi belanja pangan yang relatif tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan pengeluaran di NTB cenderung bersifat survival-driven, yakni didorong tekanan kebutuhan dasar dan dinamika harga, bukan sepenuhnya welfare-driven yang merefleksikan ekspansi kualitas hidup. Intinya, meskipun terjadi akselerasi pertumbuhan konsumsi antarwilayah, kualitas transformasi kesejahteraan masih berada pada fase transisional dengan disparitas spasial yang nyata antara wilayah urban dan rural.

Kendati memberikan diagnosis komprehensif, studi ini memiliki sejumlah keterbatasan metodologis. Pertama, penggunaan data agregat pengeluaran belum mampu menangkap heterogenitas mikro rumah tangga seperti struktur demografi, pendidikan, dan jenis pekerjaan yang memengaruhi perilaku konsumsi. Kedua, pendekatan kuantitatif deskriptif berbasis CAGR dan Engel Ratio belum menguji hubungan kausalitas ekonometrik antara pengeluaran, inflasi, kemiskinan, dan ketahanan ekonomi. Ketiga, dimensi kualitas konsumsi – termasuk kecukupan gizi, investasi pendidikan, dan belanja kesehatan – belum terintegrasi akibat

keterbatasan data sektoral. Pada penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan model panel longitudinal, integrasi data sosial-demografi, dan pendekatan kesejahteraan multidimensi agar mampu membaca transmisi pertumbuhan konsumsi terhadap kualitas hidup secara lebih presisi, komprehensif, dan kausal.

Menindaklanjuti kesimpulan, diperlukan langkah strategis dalam konteks pembangunan kesejahteraan di Provinsi NTB dengan memperkuat transformasi kualitas konsumsi melalui intervensi kebijakan yang simultan dan terstruktur. Pertama, stabilisasi harga dan ketersediaan pangan strategis perlu diprioritaskan melalui pengendalian inflasi daerah, penguatan cadangan pangan, serta efisiensi distribusi logistik guna menurunkan tekanan proporsi pengeluaran makanan rumah tangga. Kedua, diversifikasi sumber pertumbuhan pendapatan masyarakat harus dipercepat melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata inklusif, hilirisasi sektor primer, penguatan UMKM, dan ekonomi kreatif agar kapasitas disposable income meningkat dan mendorong pergeseran konsumsi ke sektor non-pangan produktif. Ketiga, perluasan investasi sosial melalui akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial adaptif menjadi krusial untuk memperkuat kapasitas belanja pembangunan manusia rumah tangga. Keempat, integrasi kebijakan ketahanan pangan dengan agenda pengentasan kemiskinan dan pengurangan disparitas wilayah harus dilakukan secara lintas sektor agar transformasi kesejahteraan berlangsung inklusif. Kelima, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem welfare accounting berbasis pengeluaran riil dan struktur konsumsi sebagai instrumen monitoring-evaluasi kualitas pertumbuhan ekonomi, sehingga arah kebijakan tidak hanya berfokus pada ekspansi output, tetapi juga pada upaya peningkatan utilitas kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Herie Saksono yang telah memberikan materi Perkuliahan Perekonomian Indonesia pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Al-Azhar (UNIZAR), Mataram, Lombok, NTB. Selain itu, kami berterima kasih juga kepada kakak Karina Juniarti Utami selaku Asisten Dosen atas arahan yang sangat berharga yang telah diberikan selama ini. Dukungan dan ilmu yang diberikan menjadi motivasi serta sumber inspirasi yang sangat berarti dalam penyelesaian karya tulis ilmiah (KTI) ini.

Referensi

- Abdalla, S. S. M., & Elzaki, R. M. (2022). Assessment of Food and Nutrition Insecurity using Food Consumption Data in Central Sudan. *Current Research in Nutrition and Food Science*, 10(3), 1116–1129. <https://doi.org/10.12944/CRNFSJ.10.3.25>
- Aisyah, H., Dahlan, M. D., & Aprilia, M. (2023). Pengaruh Hubungan antara Ketimpangan Pendapatan, Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Perspektif dari Indonesia. *Jurnal Economina*, 2(12), 3722–3736. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1065>
- Angraeni, M., Uswatun, U., & Saiful, M. (2025). Analisis Dampak Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat. *Journal of Economics Development Research*, 1(3), 82–90. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i3.143>
- Aprilia, D., Susilawati, N., Utami, K. J., & Saksono, H. (2025). Mengapa Digital Gagal Menyerap Tenaga Kerja? *Aletheia: Jurnal Sosial & Humaniora, Inovasi, Ekonomi, Dan Edukasi*, 2(1), 61–70. <https://doi.org/10.63892/aletheia.2.2025.61-70>
- Apriliani, D., Ernawati, S., Utami, K. J., & Saksono, H. (2024). Transformasi Agribisnis: Paradoks Peningkatan Produksi Padi di Tengah Penurunan Luas Panen Antarwilayah NTB 2018–2023. *Aletheia: Jurnal Sosial & Humaniora, Inovasi, Ekonomi, Dan Edukasi*, 1(2), 61–70. <https://doi.org/10.63892/aletheia.1.2024.61-70>
- Amelia, A. P., Sutanto, H., & Fadlli, M. D. (2025). Pengaruh Konsumsi, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019–2023. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2), 18–34. <https://doi.org/10.59827/jie.v4i2.308>
- Aprirachman, R., Purnama, Y., & Safitri, O. (2025). A - Pengaruh Pengangguran dan Pengeluaran Perkapita Thd IKK Prov. NTB 2022–2024. *Benefit: Journal of Business, Economics, And Finance*, 1022–1032. <https://doi.org/https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1362>
- Artika, I. B. E., & Marini, I. A. K. (2023). Implikasi Ekonomi dari Pola Konsumsi Pangan dan Non Pangan Masyarakat Kota Mataram Tahun 2018 – 2022. *Ganec Swara*, 17(2), 510–516. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i2.450>

- Béné, C. (2022). Why the Great Food Transformation may not Happen – A Deep-Dive Into our Food Systems' Political Economy, Controversies and Politics of Evidence. *World Development*, 154, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105881>
- Dávila, E., & Schaab, A. (2023). Nber Working Paper Series Welfare Accounting. *National Bureau of Economic Research*, 1–70. <http://www.nber.org/papers/w31717>
- Dávila, E., & Schaab, A. (2024). Welfare Accounting. *Cowles Foundation for Research in Economics*, 1–52. <http://cowles.yale.edu/>
- De Magalhaes, L., & Santaaulalia-Llopis, R. (2015). *The Consumption, Income, and Wealth of the Poorest Cross-Sectional Facts of Rural and Urban Sub-Saharan Africa for Macroeconomists*. <http://econ.worldbank.org>.
- Defla, N., Barbu, A., Ion, V. A., Vidu, L., Peș, E., Cune, L.-C., & Bădulescu, L. A. (2025). Socio-Demographic Correlates of Basic Food Needs: A Maslow's Hierarchy Analysis. *Foods*, 15(1), 1–27. <https://doi.org/10.3390/foods15010057>
- Desmet, K., & Rossi-Hansberg, E. (2013). Urban Accounting and Welfare. *American Economic Review*, 103(6), 1–49. <https://doi.org/10.1257/aer.103.6.2296>
- Duarte, M. (2020). Manufacturing consumption, relative prices, and productivity. *Journal of Macroeconomics*, 65, 103232. <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2020.103232>
- Eastwood, R. (2012). Macroeconomic Approaches to Identifying the Effects of Health on Output, Growth and Poverty. *African Development Review*, 24(4), 279–290. <https://doi.org/10.1111/1467-8268.12008>
- Handayani, S., & Yulistiyono, H. (2023). Pengaruh Pendapatan, Jumlah Anggota Keluarga dan Pendidikan Terhadap Konsumsi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Banyuwangi. *Neo-Bis: Jurnal Berkala Jemu Ekonomi*, 12(1), 32–47. <https://doi.org/10.21107/NBS.V12I1.21671>
- Hariyanto, W., Suhendrata, T., & Jauhari, S. (2021). Analysis Income and Household Expenses Based on Livelihood. *E3S Web of Conferences*, 232, 01005. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123201005>
- Kassahun, T., Tessema, A., & Adbib, K. (2022). Analysis of Rural Household Food and Non-Food Poverty Status in Ethiopia: The Case Study From Meskan District. *Food and Energy Security*, 11(2), 1–15. <https://doi.org/10.1002/fes3.363>
- Khan, J., & Mohanty, S. K. (2022). Regional Pattern of Child Undernutrition, Calorie Consumption, Non-Food Expenditure and Wealth in India. *Clinical Epidemiology and Global Health*, 13, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.cegh.2021.100942>
- Marchetti, S., & Secondi, L. (2022). The Economic Perspective of Food Poverty and (In)security: An Analytical Approach to Measuring and Estimation in Italy. *Social Indicators Research*, 162(3), 995–1020. <https://doi.org/10.1007/s11205-021-02875-5>
- Mustafa, A. M., Azimli, A., & Sabir Jaf, R. A. (2022). The Role of Resource Consumption Accounting in Achieving Competitive Prices and Sustainable Profitability. *Energies*, 15(11), 1–23. <https://doi.org/10.3390/en15114155>
- Primadianti, N., & Sugiyanto, C. (2020). Ketimpangan Regional, Pertumbuhan Ekonomi Pro Poor, Dan Kemiskinan Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.14710/jdep.3.1.1-20>
- Stehl, J., Depenbusch, L., & Vollmer, S. (2025). Global Poverty and the Cost of a Healthy Diet. *Food Policy*, 132, 1–33. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2025.102849>
- Sibrián, R. (2008). Deriving Food Security Information From National Household Budget Surveys: Experiences, Achievements, Challenges. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Sibrián, R. (2008). *Deriving Food Security Information From National Household Budget Surveys: Experiences, Achievements, Challenges*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Tudorel, A., Régis, B., & Andreea, M. (2024). Consumption Expenditures on Food, Non-Food Products and Services in Romania. *Prague Economic Papers*, 33(5), 617–644. <https://doi.org/10.18267/j.pep.874>